

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal yang baru saja ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa pada Jum'at, 12 September 2025 memunculkan beragam tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan media publik. Pasalnya, kebijakan diberlakukan 4 hari setelah pelantikan Menteri Keuangan yang baru dan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang lama. Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 8 September 2025 merupakan bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif konstruksi pemberitaan media

Adapun kebijakan fiskal yang disahkan tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berisi tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.¹ Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Uang negara yang dimaksud, akan dialokasikan ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) jumlahnya senilai 200 Triliun Rupiah. Dana tersebut merupakan setengah dari dana pemerintah yang sebelumnya

¹ Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 Tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan Dan Kekurangan Kas Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

disimpan di Bank Indonesia. Melalui kebijakan baru, pemerintah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sistem perbankan guna memperkuat likuiditas perekonomian dalam negeri.

Sesuai dengan pernyataan Purbaya pada Rapat Kerja bersama dengan komisi XI DPR RI pada Rabu, 10 September 2025 menyatakan bahwa ada sekitar Rp425 Triliun Rupiah uang negara yang mengendap di Bank Indonesia. Dana tersebut akan dialokasikan dalam bentuk deposito oleh pemerintah dan bank Himbara dilarang menggunakannya untuk pembelian surat berharga negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Adapun aliran perincian dana 200 Triliun adalah sebagai berikut: ²

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
- c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
- d. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); dan
- e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

² *Ibid.*

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2024 yang rilis pada tanggal 5 Februari 2025 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi alasan Menkeu Purbaya untuk memperbaikinya. Kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya strategis untuk mempertebal likuiditas sektor perbankan serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rencananya setelah dana dialirkan ke Bank Himbara, dana tersebut akan dapat dialirkan ke masyarakat lewat penyaluran kredit, pinjaman, maupun deposito. Tentu dalam hal ini, Menteri Keuangan tidak sendirian. Pihaknya bersinergi dengan bank sentral yang ada sebagai tempat penimbunan uang kas negara, dalam hal ini Bank Indonesia.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Indonesia sebagai bank sentral membuat media massa berbondong-bondong meliput dan memberitakannya. Bank Indonesia sendiri memiliki tiga fungsi utama yakni mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.³ Sebagai lembaga independen, setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu menjadi otonomi penuh dan bebas dari campur tangan pihak lain. Kewenangan dalam

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Bagaimana media massa menggambarkan peran dan kebijakannya dalam konteks kebijakan Menteri Purbaya Tahun 2025 akan sangat penting untuk diketahui bersama.

Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps (*baca : basis point*). Hal ini disampaikan lewat Rapat Dewan Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2025 menjadi 4,75%.

Tabel 1. 1 Data History BI Rate (sumber : <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx> diakses pada 12 Oktober 2025)

NO	Tanggal	BI-7Day-RR
1	17 September 2025	4.75 %
2	20 Agustus 2025	5.00 %
3	16 Juli 2025	5.25 %
4	18 Juni 2025	5.50 %
5	21 Mei 2025	5.50 %
6	23 April 2025	5.75 %
7	19 Maret 2025	5.75 %
8	19 Februari 2025	5.75 %
9	15 Januari 2025	5.75 %
10	18 Desember 2024	6.00 %

Pemangkasan suku bunga yang terjadi hingga 4 kali sejak awal tahun 2025 dinilai sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Meskipun terdapat penambahan likuiditas dari kebijakan fiskal Menteri Purbaya yang dikhawatirkan dapat menekan suku bunga acuan, namun BI Rate akan selalu dievaluasi. Rapat Dewan Gubernur tentu mengikuti perkembangan ekonomi dan menentukan BI Rate dengan perkiraan matang untuk memastikan kebijakan moneter dan fiskal bekerja harmonis.

Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat. Berita yang disampaikan oleh media dapat mempengaruhi cara orang memandang masalah sosial, politik, dan budaya. Terutama ketika berhubungan dengan kebijakan ekonomi serta fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan utama di negara ini. Sampai saat ini, banyak artikel dan berita yang membahas tentang kebijakan Menteri Keuangan Purbaya. Perubahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Purbaya Sadewa telah memicu diskusi di media mengenai arah kebijakan ekonomi dan dampaknya. Peristiwa transisi ini menciptakan kesempatan bagi media untuk menginterpretasikan peran kebijakan pemerintah yang sebenarnya.

Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Tidak sembarang pers memberikan berita yang faktual karena banyak diluar sana informasi dari media massa yang berguna menggiring

opini dan menyebar kegaduhan di negeri ini. Untuk itu, dalam penelitian ini tentu menggunakan objektivitas media massa yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga independen yang melindungi kehidupan pers di Indonesia telah menghimpun 371 perusahaan pers cetak yang terverifikasi faktual⁴. Penelitian ini akan menggunakan objek berita dari salah satu pers yang terverifikasi faktual oleh Dewan Pers yakni Kompas.com dan Tempo.co. Kedua media ini merupakan media nasional yang memiliki jangkauan pembaca luas dan kredibilitas tinggi. Berdasarkan Reuters Institute Digital News Report 2025, Kompas.com termasuk media online yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia dengan tingkat penggunaan mingguan mencapai 37 persen responden, sedangkan Tempo.co juga masuk dalam jajaran media yang banyak diakses publik.

Selain aspek jangkauan pembaca, kedua media dipilih karena memiliki karakter editorial yang berbeda. Kompas.com dikenal dengan gaya pemberitaan yang lebih moderat dan informatif, sedangkan Tempo.co memiliki karakter yang lebih kritis dan evaluatif terhadap kebijakan publik. Perbedaan karakter tersebut relevan dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas yang berbeda terhadap kebijakan yang sama.

⁴ Data Perusahaan Pers Indonesia, <https://dewanpers.or.id/data> diakses pada 12 Oktober 2025

Media memberitakan langkah-langkah Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia dengan berbagai *frame*. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan arah tujuan dalam memetakan konstruk pemberitaan dan menganalisis implikasinya terhadap persepsi Menteri Keuangan di tengah kebijakan ekonomi baru. Tentunya, analisis peneliti juga akan membantu mengidentifikasi *frame* mana yang dominan diberitakan oleh media. Wacana publik akan otomatis terbentuk dari narasi-narasi yang diberitakan sehingga dapat menjadi gambaran akan dinamika moneter dalam situasi politik ekonomi Indonesia yang berubah-ubah.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Penelitian

Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja isu yang dimunculkan dalam pemberitaan kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025?
2. Nilai, kepentingan, dan narasi apa yang ditonjolkan media dalam mengemas isu kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025?

Penelitian ini akan menggunakan portal berita online dari media mainstream, Kompas.com dan Tempo.co dengan batasan berita yang terbit pada bulan September – November 2025. Pemilihan batas waktu 3 bulan ini didasarkan pada waktu triwulanan sebuah masa uji coba kebijakan. Sehingga, dinilai sesuai dengan konstruksi awal kebijakan di masa

kepemimpinan Purbaya. Berita dalam rentang waktu tersebut digunakan sebagai sumber data untuk menganalisis konstruksi pemberitaan penempatan dana Rp200 triliun sebagai kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui isu apa saja yang muncul dalam pemberitaan kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025.
2. Mengetahui bagaimana nilai, kepentingan, dan narasi yang digambarkan media dalam mengemas kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan mampu menambah kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam ranah analisis media dan konstruksi pemberitaan. Dengan memfokuskan pada pemberitaan mengenai kebijakan awal Menteri Purbaya, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami bagaimana media membingkai isu ekonomi-politik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas literatur mengenai studi

framing dan wacana media dalam konteks kebijakan moneter dan ekonomi Indonesia.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik pada isu komunikasi politik-ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi studi kasus konkret yang menunjukkan keterkaitan antara pemberitaan media, peran bank sentral, serta dinamika kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

3. Manfaat Praktis

Bagi praktisi media, penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana konstruksi berita mampu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini dapat menjadi masukan dalam merancang strategi pemberitaan yang lebih berimbang, objektif, dan informatif. Selain itu, penelitian ini juga memberi wawasan kepada humas pemerintah dalam menggambarkan bagaimana kebijakan mereka direpresentasikan di media.

4. Kegunaan Lembaga

Penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk lembaga kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik pada program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

E. Penegasan Istilah

1. Konstruksi

Konstruksi atau susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁵ Sementara itu, menurut Kamus Komunikasi, konstruksi didefinisikan sebagai sebuah ide, yaitu sebuah abstraksi yang merupakan generalisasi dari hal-hal yang spesifik, yang dapat dicatat dan diukur.⁶

Konstruksi disini merujuk pada konstruksi sebuah pemberitaan yang diartikan sebagai sebuah proses bagaimana media mengolah dan menyajikan realitas melalui pemilihan fakta dan perspektif tertentu.

2. Berita

⁵ KBBI Daring, “Konstruksi”, diakses pada 10 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁶ Onong uchjana effendi. *Kamus Komunikasi*. 1989. Bandung : Mandar Maju. hal. 264.

Setiap hari semua orang selalu mengalami sebuah peristiwa sehingga tidak lepas dari sebuah berita. Terkadang peristiwa tersebutlah yang perlu dibedakan antara yang layak dimuat dalam media dan yang tidak. Adi Bajuri dalam konteks berita menyatakan bahwa berita adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media.⁷ Sedangkan paham konstruksionis yang dijelaskan oleh Eriyanto (2002), berita bukanlah cermin realitas, melainkan hasil konstruksi media yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, dan rutinitas produksi berita.

3. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai bank sentral Republik Indonesia, yang memiliki tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dengan tujuan tunggal mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 bidang yang dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Sistem Keuangan. Pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Tidak ada pihak yang diperbolehkan mengintervensi

⁷ Anton Maburki KN, Produksi Program TV Non-Drama, (Gramedia:2018), Hlm 261

pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia pun wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun.

4. Kebijakan Menteri Purbaya

Dalam konteks kebijakan, William Dunn (2018) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kebijakan merupakan sekumpulan ide dan prinsip yang menjadi pedoman serta fondasi rencana dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan perilaku (terhadap pemerintahan, organisasi, dan lain-lain).⁸

Kebijakan awal merujuk pada keputusan, strategi, atau langkah awal yang diambil oleh seorang pejabat baru setelah menjabat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan awal Menteri Purbaya tahun 2025 berarti program atau langkah strategis pertama yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

⁸ KBBI Daring, “Kebijakan”. diakses pada 10 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>